

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pergerakan Nasional memiliki suatu pengertian yang khas yakni merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern kearah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang ada. Dengan demikian istilah ini mengandung arti yang sangat luas, gerakan yang dijalankan memang tidak hanya terbatas untuk memperbaiki taraf hidup bangsa tetapi juga meliputi gerakan diberbagai sektor, seperti : sosial, ekonomi, pendidikan, keagamaan, kebudayaan, wanita, pemuda, dan lain-lain.

Istilah “Nasional” berarti pergerakan-pergerakan yang mempunyai cita-cita nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsanya yang masih terjajah. Di samping itu, sifat pergerakan pada masa ini lebih bersifat nasional bila disbanding dengan sifat pergerakan sebelumnya yang bercorak kedaerahan.

Masa awal lahirnya pergerakan nasional ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan seperti Boedi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908, tiga tahun setelah Boedi Oetomo lahir, berdiri organisasi baru bagi orang-orang islam yaitu Sarekat Dagang Islam (SDI) di Solo oleh Haji Samanhudi yang didirikan pada tahun 1911, lalu namanya dirubah menjadi Sarekat Islam untuk menarik anggota lebih banyak. Selain organisasi yang disebut di atas masih banyak lagi organisasi-organisasi pergerakan lainnya yang bersifat kooperatif maupun radikal, baik dalam Negeri maupun yang diluar Negeri.

Organisasi memiliki pandangan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai kemajuan. Organisasi inilah yang menjadi pelopor terbentuknya organisasi-organisasi pergerakan

nasional di Indonesia. Ada banyak organisasi-organisasi pergerakan di Indonesia, organisasi pergerakan juga mengalami kemajuan yang cukup besar pada masanya. Karena kemajuan yang cukup besar tersebut maka organisasi-organisasi pergerakan berkembang pula di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Daerah Buol adalah salah satu daerah yang hubungan dagangnya cukup luas, hubungan dagang yang dibangun oleh masyarakat Buol dengan daerah luar mendapat manfaat begitu besar, Karena dengan adanya hubungan dagang dengan daerah luar khususnya daerah Jawa maka Buol tidak terlepas dari gerakan kebangsaan.

Pengaruh adanya hubungan perdagangan antara Buol dan Pulau Jawa khususnya Surabaya, maka daerah Buol tidak akan terlepas dari gerakan kebangsaan yang berkembang di pulau Jawa yang dipelopori oleh tokoh-tokoh antara lain H. Oemar Said, Tjokroaminoto, Ir. Soekarno, dan lain-lain. Gerakan kebangsaan ini tumbuh dan berkembang pula di Buol dengan terbentuknya Sarekat Islam (SI) oleh saudagar Raja Binol dan T. Mangkona pada tahun 1917. Juga pada tahun 1928, terbentuk Partai Nasional Indonesia dengan ketuanya G. Batalipu.

Pergerakan Buol mendapatkan perhatian dari tokoh-tokoh penggerak Nasional yang untuk itu telah menyempatkan diri mengunjungi Buol antara lain Abdul Muis 1918, Sangaji, Mr. Iskaq dan Yusuf Sammah. Kedatangan para tokoh penggerak ini menambah semangat pemimpin-pemimpin penggerak di Buol untuk mengembangkan Cita-cita atau perjuangan kemerdekaan sesuai dengan tahap perjuangannya. Pada tahun 1928 Sarekat Islam Buol mengubah diri menjadi PSII. Dengan merubah ini PSII lebih meningkatkan aktifitasnya pada penolakan kerja rodi sehingga menggoyahkan pemerintah pada waktu itu kegiatan PSII banyak ditunjuk untuk membela kepentingan rakyat.

Pada tanggal 31 Maret 1934, PSII terbagi dua yaitu PSII Buol Barat dan PSII Buol Timur. Selain pergerakan dalam bidang politik dengan mengadakan tabliq-tabliq dan rapat-rapat terbuka, PSII bergerak juga dalam bidang Pendidikan dengan mendirikan Sekolah Islam di Buol pada tahun 1934, juga dalam bidang pembinaan generasi muda dengan mendirikan Pandu siap pada tahun 1931, dan pada tahun 1936 PSII terbagi lagi menjadi dua, yaitu PSII HIJRAH dan PSII COOPORATIF. Apabila periode sebelumnya perjuangan PSII banyak diarahkan pada perjuangan yang bersifat kepentingan lokal seperti penghapusan kerja rodi, keringanan pajak atau mencela perbuatan-perbuatan penguasa yang tidak senonoh, maka pada perjuangan selanjutnya utamanya mendekati pecahnya perang dunia II, perjuangan PSII sudah bersifat nasional.

Ketika perang dunia ke II, Jepang ikut terjun dalam perang tersebut. Maka muncul dugaan berdasarkan analisis politik akan terjadi peperangan dilautan Pasifik. Hal ini terbukti dengan meletusnya perang dilautan Pasifik pada 8 Desember 1941 yang melibatkan Jepang didalamnya. Perang ini disebut dengan “Perang Asia Timur Raya” atau “Perang Pasifik”. Akibat dari perang tersebut Belanda telah tergabung dalam Front ABCD (Amerika Serikat, Britania/Inggris, China, Dutch/Belanda) melakukan perang terhadap Jepang. Jepang berhasil menguasai daerah Asia Tenggara yang lain seperti Muangthai, Filipina, Malaysia dan Birma. Karena Jepang terlalu kuat maka Hindia Belanda pun akhirnya jatuh ketangan Jepang setelah Belanda yang dibantu sekutu melakukan berbagai perlawanan tetapi tidak mampu mengalahkan Jepang.

Selain itu di Jawa muncul ramalan “Joyoboyo” yang menyatakan bahwa pada suatu saat pulau Jawa akan di jajah oleh bangsa Kulit Kuning, meskipun hanya seumur jagung, tetapi setelah itu maka Indonesia akan merdeka. Ramalan ini dipercaya oleh rakyat, Karena itu Jepang memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan yang ada tersebut. Sehingga kedatangan Jepang ke Indonesia 1942 tersebut dianggap sebagai satu hal yang bisa dan sudah semestinya

terjadi. Jepang menguasai Indonesia diawali dari menduduki tarakan (10 Januari 1942) kemudian Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, dan Ambon. Pada Februari 1942 menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Bagi Jepang Palembang merupakan tempat yang strategis hal ini dikarenakan letak Palembang diantara Batavia sebagai pusat kekuasaan Belanda dan Singapura yang merupakan pusat kedudukan Inggris. Di daerah Jawa Jepang pertama mendarat di Banten kemudian ke Indramayu, Kragan (Rembang dan Tuba). Pada 5 Maret 1942 Jepang menyerag Batavia dan 8 Maret 1942 Jepang menyerang Bandung dan berhasil mendudukinya setelah Belanda menyerah kepada panglima Jepang Imamura, sehingga sejak 9 Maret 1942 Indonesia menjadi daerah kekuasaan Jepang.

Sejak Jepang menduduki Indonesia 9 Maret 1942 pemerintah militer Jepang melarang semua kegiatan politik yang kemudian disusul dengan keluarnya peraturan yang membubarkan semua organisasi, akan tetapi pertengahan 1942 pemerintah Jepang memperlunak peraturan dengan mengizinkan berdirinya organisasi yang bertujuan membantu perang Jepang (Susanto Tirtoprojo, 1968). Sudah dapat dipastikan organisasi itu harus loyal terhadap pemerintah pendudukan Jepang telah mengakibatkan perubahan-perubahan yang mendasar pada masyarakat Buol. Tekanan-tekanan yang bersifat politis terhadap lembaga-lembaga politik Tradisional maupun lembaga politik Ilegal telah menghancurkan tatanan sistem politik dipedesaan. Pengawasan sosial diberlakukan dengan pembentukan organisasi-organisasi sosial yang diarahkan untuk mengadakan kontrol terhadap aktivitas masyarakat, serta tekanan-tekanan mental agitasi yang dilaksanakan pemerintah pendudukan Jepang secara terus menerus.

Peraturan pemerintah Militer Jepang dalam hal pengaturan pangan dipandang oleh kalangan sangat represif dan pengawasannya ketat. Distribusi bahan makanan dari kampung ke kampung mendapat izin dari Jepang. Kondisi nyata untuk memperoleh izin ini bukanlah hal yang

mudah diperoleh, berbagai pertanyaan harus dijawab dan bahan makanan dibatasi sesuai keperluan. Hal ini mengakibatkan usaha dagang rakyat menjadi macet dan membawa kemelaratan bagi masyarakat Buol.

Bangsa Jepang adalah bangsa yang menjajah Indonesia, penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Jepang pada saat itu sangat menindas khususnya masyarakat Buol.

Waktu itu mensinyalir bahwa ada kapal-kapal perang pihak sekutu yang memasuki pelabuhan Lokodidi, Busak, dan Paleleh. Dan dalam laporan yang masuk di katakan seolah-olah rakyat Buol telah membantu bahan-bahan makanan. Selain membantu pihak sekutu, di tuduhkan pula di Buol ada gerakan bawah tanah anti Jepang, menanamkan demokrasi dikalangan rakyat menuju Indonesia merdeka dengan nama “Musyawarah” pimpinan atau mangkona.

Awal februari 1944 dari Manado dikirim 3 orang Intelijen masing-masing Aigato perwira Jepang, Kumontoy (Dahulunya anggota KNIL) dan Ali (Butjo lagoan asal Gorontalo). Mereka ini datang langsung mengadakan penangkapan-penangkapan mulai dari kampung Kwalabesar sampai Lakea dan tercatat sekitar 400 orang yang ditawan dan dibawa ke Leok. setelah diadakan pengusutan akhirnya 144 dibawa ke Manado sedang selebihnya ditahan di Leok. Mereka yang ditawan terdiri dari rakyat biasa, tokoh-tokoh masyarakat dan pimpinan partai, Guru, Pamong Desa, Polisi, Gantjo (Camat), Jogugu (Suyaku), dan raja Buol sendiri (Sutjo), Haji Ahmad Turungku. Para tahanan ini lebih dikenal sebagai tawanan Kumotoy, Karena yang melakukan pemeriksaan adalah Kumotoy yang terkenal kejam dan dia pulalah yang menentukan salah tidaknya seseorang dalam menghadapi tuduhan sebagai mata-mata musuh dan anti Jepang, sementara itu 144 orang yang dibawa ke Manado dimasukkan ke penjara dan mengalami siksaan-siksaan ala Jepang yang terkenal itu, dimana merekapun dikumpulkan dengan tahanan-tahanan lainnya dari berbagai daerah sekitarnya. Empat bulan mereka dipenjara, separuh meninggal

dipenjara sedang selebihnya dapat kembali ke Buol, nama-nama mereka masih diingat dan mereka yang berhasil keluar kembali ke Leok sekitar bulan Juni 1994.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang mendorong munculnya Organisasi-organisasi pergerakan di Buol !
2. Bagaimana bentuk perlawanan organisasi pergerakan di Buol selama masa pergerakan !

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini difokuskan dengan diberi batasan pada tiga aspek yaitu :

1. Scope Kajian

Kajian dalam karya ini mengarah pada bidang atau yang akan dikaji yaitu mengenai sejarah Organisasi Pergerakan Nasional di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah Tahun 1917-1945. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan pada peristiwa munculnya organisasi pergerakan nasional di Buol dan bagaimana bentuk perlawanan organisasi-organisasi selama masa pergerakan.

2. Scope Spesial

Spesial dalam penelitian ini difokuskan di Kabupaten Buol yang terletak di Sulawesi Tengah berbatasan dengan Gorontalo karena penulis berasal dari daerah tersebut, sehigga merasa perlu untuk mengambil bagian dalam usaha melestarikan dan menyajikan sejarah organisasi pergerakan nasional di Buol.

3. Scope Temporal

Secara temporal pembahasan dalam penelitian ini diambil batasan waktu pada tahun 1917 sampai dengan 1945 pembatasan ini didasari oleh asumsi bahwa ditahun 1917 masuknya organisasi pergerakan nasional di Buol, dengan rentang periode ini kiranya menarik untuk menelaah peristiwa-peristiwa yang terjadi di Buol secara ilmiah.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor munculnya pergerakan nasional di Buol.
2. Untuk mengetahui bentuk perlawanan masyarakat Buol pada masa pergerakan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat terhadap masyarakat, agar lebih mengetahui kondisi Buol pada masa penjajahan, serta sebagai sumber informasi keberadaan Organisasi Pergerakan Nasional di Buol.

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yakni sebagai bagian yang sangat penting oleh penulis, Karena mengingat sampai sekarang ini masih kurangnya penelitian tentang organisasi-organisasi pergerakan nasional di Buol tahun 1917-1945, untuk mengenal kembali sejarah Buol dalam pergerakan nasional.

1.6 Kerangka Teori dan Pendekatan

Menurut Kedourie Nasionalisme adalah doktrin yang berpretensi untuk memberikan satu kriteria dalam menentukan unit penduduk yang ingin menikmati satu pemerintah eksklusif bagi dirinya, untuk melegitimasi pelaksanaan kekuasaan dalam negara, dan untuk memberikan hak mengorganisasikan suatu masyarakat negara. Dengan kata lain, doktrin ini beranggapan bahwa secara alamiah, komunitas dibagi menjadi bangsa-bangsa, bahwa bangsa dikenal mempunyai

karakteristik khusus yang dapat ditentukan, dan bahwa corak pemerintah yang sah hanyalah *self-governement*. Cakupan defenisi ini dapat dibandingkan dengan yang disajikan oleh Nagentgast. Bangsa dan nasionalisme, demikian menurut Nagentgast, adalah istilah modernitas yang ada di Eropa dan Amerika Utara. Ia diturunkan dari alam pencerahan kondisi rasionalisme, perluasan penjajahan, peperangan agama, dan kapitalisme liberal yang berfungsi sebagai pembenaran politik dan legitimasi politik untuk konsep penyatuan territorial, politik, dan budaya yang dipaksakan oleh hegemoni pemikiran dan organisasi liberal.

Lain pihak, Smith berpendapat bahwa nasionalisme adalah satu gerakan ideologis untuk meraih dan memelihara otonomi, kohesi dan *individuality* bagi satu kelompok sosial tertentu yang diakui oleh beberapa anggotanya untuk membentuk atau menentukan satu bangsa yang sesungguhnya atau yang berupa potensi saja, sedangkan menurut Minogue, nasionalisme merupakan gerakan politik untuk memperoleh dan mempertahankan integritas politik, yakni gerakan politik yang didasarkan pada perasaan tidak puas sekelompok orang menentang orang asing. Dengan cara pandang demikian, Smith mengidentifikasi adanya dua jalan menuju nasionalisme. Kedua, “route” nasionalis, nasionalisme.

Faktor utama yang melatarbelakangi lahirnya pergerakan nasional, yaitu politik etis. Kebijakan yang bernama politik etis tersebut diambil setelah pidato Ratu Wihelmina dari takhtanya pada 1901. Ia mengumumkan “*sebagai sebuah kekuatan Kristen, Belanda wajib melakukan kebijakan pemerintah di hindia dengan kesadaran bahwa belanda memiliki kewajiban moral kepada rakyat di wilayah-wilayah tersebut.*” kebijakan tersebut berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan, perluasan pendidikan, perluasan fasilitas komunikasi, irigasi dan infrastruktur lainnya, serta pelaksanaan transmigrasi yang membawa keuntungan untuk kepentingan perniagaan Barat serta untuk orang Indonesia sendiri. Lalu politik etis akhirnya menjadi senjata

makan tuan. Pendidikan melahirkan generasi terdidik dan tercerahkan generasi yang sadar mengenai jati dirinya sebagai bangsa terjajah dan berani berjuang mengusir kolonialisme.

Sehubungan dengan itu, pendekatan multidimensional sangat tepat untuk digunakan pada penelitian ini yang berjudul *organisasi pergerakan nasional di Kabupaten Buol Sulawesi Tengah tahun 1917-1945*. Karena pendekatan multidimensional mencakup didalamnya pendekatan sosiologi, ekonomi, politik, budaya, rasial, agama, dan pendekatan sosial. Maka penulis dari hasil penelitian ini menggunakan paradigm yang berbeda, sehingganya menghasilkan historiografi yang sesuai dengan peristiwa yang dikaji.

Jika dilihat dari lokasi fokus penelitian dan juga sudut pandang penelitian, maka kategori penulisan ini juga masuk dalam kategori sejarah lokal yakni Buol. Sartono Kartodirdjo mengatakan bahwa sejarah lokal pada biasanya tidak menarik untuk dilakukan penelitian Karena tidak mempunyai dampak yang sangat luas, namun bukan berarti kategori sejarah lokal tidak layak untuk diteliti. Jika unsur peristiwa lokal disuatu tempat dikaitkan dengan sejarah makro akan menarik, selain itu pulah sejarah lokal dapat mengungkapkan unsur-unsur kemanusiaan secara khusus. Selanjutnya Sartono Kartodirdjo mengakui bahwa salah satu kesulitan penulisan sejarah lokal adalah kurangnya sumber yang tersedia sehingga menyulitkan dalam penulisan sejarah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan sebuah pendekatan struktural untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dimasa lampau. Dalam kaitanya dengan penulisan ini, maka akan digunakan teori-teori seperti yang dikemukakan diatas untuk menganalisis peristiwa yang terjadi di Buol dalam konteks sosial.

1.7 Tinjauan Pustaka

Penulisan penelitian ini menggunakan beberapa literature yang telah dikaji oleh beberapa pakar atau ahli antara lain literature yang dituliskan :

(Hasanudin dan Basri Amin, 2008:201) pada tahun-tahun berikutnya afdeling bergabung kontrolilan Gorontalo berdasarkan lembaran Negara 1911 no, 266 dan 268, sejak 1 juni 1911 yang mengubah kontrolilan Gorontalo dan Limboto kedalam kontrolilan Gorontalo, Boalemo, Kwandang, dan Buol. Pada tahun 1924 sejak dikeluarkan *staatband* (lembaran Negara Belanda) no 36, wilayah kontrolilan Buol dipisah-pisahkan dari wilayah keastiten residenan Gorontalo dan distukan dengan donggala.¹

(Soedarmadji, 1983:45) Aspek politik, kedatangan pemerintah Belanda di Kerajaan Buol, utamanya juga pada soal sudah terikat kontrak sehingga pada tanggal 29 Desember 1912 asisten Residen Manado yang mengusulkan perubahan dalam pemerintah kerajaan Buol, usul ini disetujui oleh Residen Manado dalam surat keputusan 1 April 1914, isi dari surat tersebut telah merubah system pemerintahan menurut adat istiadat Buol, kemudian dirubah menjadi *Bokidu* dihapuskan jabatan-jabatan Residen, jogogu, ukumo, kapitan laut dari anakkokkunu ditiadakan. Serta distrik-distrik sederhana menjadi tiga Distrik Bunobogu, Biau, dan Paleleh.²

1.8 Metode Penelitian

Penelitian dan penulisan sejarah ini dilakukan secara ilmiah, maka penelitian dan penulisan sejarah menggunakan metode sejarah. Metode itu sendiri berarti suatu cara, prosedur, atau tehnik untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efesien. Metode harus dilakukan dengan Metodologi, metode penelitian terbagi atas empat metode yaitu :

a. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

¹ Hasanudin dan Basri Amin, *Dinamika Sejarah Masa Kolonial Belanda, Gorontalo*, Pusat Dukumentasi rakya Gorontalo-AP3G dan Balai Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado

² Soedardmadji, *Mengenai Buol Toli-toli, Pemerintah Tingkat II Kab. Buol Toli-toli*, 1983:45

Heuristik adalah tahap pengumpulan sumber dilapangan, hal ini memerlukan kemampuan teoritik yang bersifat deduktif-spekulatif sebagai tertuang dalam proposal atau rancangan penelitian akan di uji secara induktif-empirik atau pragmatic. Adapun dalam mengumpulkan sumber dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka penulis mengambil dua cara yaitu :

1. Penelitian lapangan, dimaksudkan untuk mendapatkan sumber melalui observasi langsung ke lokasi wilayah kabupaten Buol serta melakukan wawancara dengan masyarakat-masyarakat Buol. Observasi dan sumber lisan menjadi penting dalam penelitian sejarah terutama apabila seorang peneliti sangat sulit menemukan sumber primer tertulis. Taufik Abdullah, dkk (1985:XV) mengemukakan bahwa “Begitulah umumnya kalau kajian-kajian tertulis telah habis, sedangkan lubang-lubang informasi dalam usaha untuk mendapatkan rekonstruksi yang relatif utuh belum tercapai maka kenapa tidak digunakan pula sejarah Lisan ”
2. Penelitian Pustaka, dilakukan dengan meneliti sumber-sumber tertulis berupa buku yang membahas organisasi pergerakan nasional di Indonesia pada umumnya dan secara khusus di Wilayah Sulawesi Tengah serta Buol. Langkah ini ditempuh sebagai kajian komperatif dari sumber lisan yang diperoleh sehingga akumulasi data dapat berimbang.

b. Kritik Sumber

pada dasarnya kedua langkah pengumpulan (Heuristik) dan kritik (Verivikasi) sumber, bukanlah dua langkah kegiatan yang terpisah secara ketat yang satu dengan yang lain. Kritik sumber sejarah dilakukan dengan secara serentak (simultaneously), bersamaan diketemukannya sumber-sumber sejarah sekaligus dilakukannya uji validasi sumber. Uji validasi sumber-sumber

sejarah inilah yang dalam penelitian sejarah lebih dikenal sebagai kritik (verifikasi) sumber-sumber sejarah.

1. Kritik Eksternal

Kritik Eksternal berusaha mempersoalkan apakah suatu sumber dapat dipercaya dalam memberikan informasi yang diperlukan. Sartono Kartodirjo (1984:16) mengemukakan bahwa “Kritik eksternal meneliti apakah dokumen tersebut autentik, yaitu kenyataan identitasnya jadi bukan tiruan atau palsu. Semuanya dilakukan dengan meneliti bahan yang dipakai, jenis tulisan, gaya Bahasa dan lain sebagainya”.

2. Kritik Internal

Kritik internal berusaha mempersoalkan apakah isi dari sebuah informasi dapat dipertanggung jawabkan sebagai sebuah informasi terkait dengan persoalan yang akan diteliti. Dalam masalah kritik internal atau dalam mencari kredibilitas, Kunto Wijoyo (2005:101) memberikan contoh misalnya “kredibilitas sebuah foto pemberian ucapan selamat dalam upacara penyempahan, maka peneliti harus memepertanyakan apakah waktu itu sudah lain ada ucapan selamat atas pengangkatan seseorang”. Jadi yang dinilai adalah aspek rasionalitas sebuah kejadian apakah sesuai dengan konteks zaman atau tidak. Seorang peneliti sejarah patut meragukan informasi sejarah yang bertentangan dengan kondisi zamannya serta tidak masuk akal, Karena sejarah terjadi dalam ruang lingkup manusia yang merupakan makhluk rasional.

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan penafsiran atau memberi makna kepada fakta-fakta (facts) atau bukti-bukti sejarah (evidences). Tahap ini membutuhkan kehati-hatian dan integritas seorang

penulis untuk menghindari interpretasi yang subjektif terhadap fakta. Moh Ali (2005:38) mengemukakan bahwa “tafsiran (interpretasi) itu merupakan sejarah menurut faham seseorang yang dapat menangkap rangkaian peristiwa atau kejadian”. Sementara itu Kuntowijoyo (2005:101) beragumen bahwa:

Interpretasi sering disebut sebagai bidang subjektif. Sebagian itu benar tetapi sebagian pula salah. Benar Karena tanpa penafsiran sejarawan maka data tidak bisa berbicara. Sejarawan yang jujur akan mencantumkan data dan keterangan dari mana data itu diperoleh sehingga orang lain dapat melihat kembali dan menafsirkan ulang. Itulah sebabnya subjektivitas penulis sejarah itu diakui, tetapi untuk di hindari.³

Proses Interpretasi terdiri dari dua langkah yaitu analisis atau menguraikan data-data yang telah terverifikasi, dan selanjutnya adalah sintesis atau proses penyatuan data sejarah menjadi sebuah konsep.

d. Historiografi

Historiografi yakni suatu kegiatan menulis kisah sejarah dalam Bahasa tetap dan menarik. Dalam penulisan sejarah umumnya sangat memperhatikan aspek kronologi agar hasilnya dapat menarik dan sistematis. Taufik Abdullah, dkk (1985:XI) mengemukakan bahwa :

Penulisan sejarah merupakan puncak dari segalanya, sebab apa yang ditulis itulah sejarah -yaitu *historie recite*- sejarah sebagaimana ia dikisahkan yang mencoba mengungkap dan memahami *historie recite*, sejarah sebagaimana terjadinya dan hasil penulisan sejarah inilah yang disebut historiografi.

Selain itu secara lebih spesifik, Helius Sjamsudin (2007:157-158) menegaskan bahwa : “dalam penulisan sejarah, digunakan secara bersamaan tiga bentuk dasar teknik tulis menulis yaitu deskripsi, narasi dan analisis”. Dengan penjelasan ini dapat dipahami bahwa sesungguhnya

³ Kuntowijoyo, pengantar ilmu sejarah, Yogyakarta, PT Bentang pustaka,2005 hal 101

menulis sejarah merupakan gabungan dari berbagai tehnik penulisan sehingga menghasilkan karya yang menarik sekaligus ilmiah.

1.9 Jadwal Penelitian

Tabel : jadwal kegiatan penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN														
		Agustus				September				Oktober						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Persiapan	✓	✓	✓	✓											
2	Pengumpulan Data					✓	✓	✓	✓							
3	Analisis							✓	✓	✓	✓					
4	Penyusunan Laporan									✓	✓	✓	✓			